

BAB IV

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PEREMPUAN DI WILAYAH PRAJA MANGKUNEGARAN

A. Pendidikan Perempuan di Mangkunegaran

Peningkatan pendidikan bagi kaum perempuan bumi putera, khususnya di daerah Mangkunegaran, tidak lepas dari perjuangan Raden Anjeng Kartini (1879-1904), putri bupati Jepara dari selirnya, Ngasirah. Kartini lahir sebagai anak perempuan *priyayi* Jawa terkemuka yang berbudi halus dan berpengetahuan luas. Sebagai perempuan yang lahir dalam tradisi Jawa kolonial, Kartini telah membuktikan dirinya mampu menjadi pendobrak tradisi patriarki yang sangat dominan waktu itu. Gagasan dan pemikiran Kartini memberi dampak yang sulit diabaikan terhadap definisi kolonial mengenai perempuan terpelajar dalam pengertian kesadaran diri modern.¹

Gagasan awal dan kegelisahan Kartini terhadap nasib perempuan pribumi dituangkan dalam kumpulan surat-suratnya yang dikirimkan kepada sahabatnya Rosa Manuel Abendanon, istri mantan Direktur Pendidikan, Agama dan Industri Hindia Belanda. Melalui surat-surat tersebut, Kartini mengungkapkan secara jelas dan terbuka perihal diskriminasi yang dialami kaum perempuan dalam masyarakat Jawa tradisional. Ia meratapi buta huruf yang ada di kalangan perempuan Jawa pada masa itu, karena tidak tersedianya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diperoleh laki-laki. Kartini juga

¹ Maria Ulfha Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta: Gadjag Mada University Press, 1978, hlm. 17.

mencela praktik poligami dan kawin paksa yang kerap kali memperdaya perempuan Jawa yang baru menginjak usia belasan tahun.

Dengan nada getir, Kartini menulis dalam salah satu suratnya, "...kami, gadis-gadis Jawa, tidak boleh memiliki cita-cita".² Dalam pandangan Kartini, perempuan Jawa hanya boleh mempunyai satu impian, dan itu adalah dipaksa menikah hari ini atau besok dengan pria yang dianggap patut oleh orang tua mereka.

Tulisan-tulisan Kartini secara jelas dan tegas mengungkapkan budaya patriarki yang sangat membelenggu kebebasan dan kemandirian perempuan. Tradisi Jawa saat itu membuat perempuan tidak dapat memutuskan apa pun untuk dirinya sendiri, termasuk keputusan untuk mendapatkan pendidikan dan menentukan pasangan hidup. Budaya Jawa menempatkan kedudukan perempuan hanya pada urusan domestik di sekitar rumah tangga sehingga bagi perempuan Jawa waktu itu, rumah tangga dianggap sebagai pusat dunia dan semesta. Artinya, dunia perempuan adalah wilayah domestik, bukan wilayah publik sehingga perempuan tidak mungkin memiliki peran di ruang publik sebagaimana laki-laki waktu itu.³

Adat dan kebiasaan tersebut telah membuat perempuan kehilangan hak-haknya sebagai warganegara untuk mengenyam pendidikan. Budaya patriarki ini juga merupakan salah satu penghambat perempuan memperoleh pendidikan

² Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942* terjemahan Jugarie Sugiarto dan Suma Riella Rusdiarti, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 148.

³ *Ibid.*, hlm. 152.

sehingga tidak salah jika R. A Kartini memperjuangkan nasib perempuan supaya perempuan tidak dianggap sebagai *konco wingking* yang hanya mengurus rumah tangga dan tidak perlu menikmati pendidikan seperti yang didapatkan oleh laki-laki.

Kartini hadir sebagai perwujudan semua tujuan moderenitas yang ingin dicapai oleh pendidikan Belanda. Kematian Kartini yang terlalu cepat tidak meyurutkan perjuangannya dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan Jawa.⁴ Tulisan-tulisan Kartini semasa hidupnya kemudian diterbitkan di Belanda dengan judul *Door duisternis tot licht (Habis Gelap Terbitlah Terang)*. Kumpulan tulisan tersebut segera meraih sukses besar di kalangan publik pembaca Belanda. Royalti buku tersebut, bersama dengan sumbangan pribadi dan subsidi pemerintah digunakan untuk mendanai berdirinya Yayasan Kartini pada tahun 1913. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1916 Yayasan Kartini berhasil membuka tujuh sekolah swasta di Semarang (1913), Batavia (1914), Madiun (1914), Bogor (1914), Malang (1915), Cirebon (1916), dan Pekalongan (1916) yang khusus memberi pendidikan dasar kepada anak-anak perempuan bangsawan pribumi.

Ibarat gayung bersambut, pendirian sekolah-sekolah perempuan ini juga didukung oleh Yayasan Van Deventer, yang didirikan pada tahun 1917. Pada tahun yang sama, Yayasan Van Deventer menyelenggarakan sekolah berasrama di Semarang dan Solo untuk pendidikan lanjutan (*Voortgezet*) bagi perempuan

⁴ Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904, pada usia 25 tahun. Kematian Kartini hanya berselang empat hari setelah beliau melahirkan putra pertamanya pada tanggal 13 September 1904.

Indonesia guna melatih perempuan Jawa sebagai guru sekolah dan sebagai istri yang trampil dalam kehidupan berumah tangga.⁵

Selain membuka sekolah untuk anak-anak perempuan bangsawan pribumi, Yayasan Kartini juga membuka tiga Sekolah Istri atau Sekolah Pribumi Kelas Dua untuk para gadis di Bogor (1924), Batavia (1927), dan Jatinegara (1928). Dengan menyamakan kurikulum Sekolah Pribumi Kelas Dua yang didukung pemerintah, meski dilengkapi dengan kursus-kursus pengetahuan ekonomi rumah tangga yang dirancang untuk mempersiapkan gadis-gadis pribumi dalam tugasnya di masa depan sebagai ibu rumah tangga. Sekolah *istri* dengan cepat mampu menarik perhatian murid perempuan dalam jumlah yang besar.⁶

Pemikiran dan karya Kartini menjadi pelopor penggerak pendidikan bagi perempuan Jawa khususnya, dan Indonesia umumnya, sehingga mampu meningkatkan peran dan kedudukan perempuan menjadi lebih baik dalam kehidupan melalui pendidikan. Semangat dan pemikiran Kartini sangat berpengaruh dan banyak memberikan motivasi bagi kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi terdorong untuk berpikir dan bertindak sehingga mereka pantas disejajarkan dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Melalui perjuangannya, Kartini telah memberikan inspirasi kepada para penerus perjuangan perempuan untuk melanjutkan perjuangannya dalam meningkatkan pendidikan bagi Bangsa Indonesia, terutama kaum perempuan di Mangkunegaran.

⁵ Frances Gouda, *op.cit.*, hlm. 151

⁶ *Ibid.*, hlm. 154.

B . Perkembangan Sekolah Perempuan di Mangkunegaran

Mangkunegaran merupakan salah satu dari empat Daerah Swapraja di Jawa Tengah. Munculnya Mangkunegaran sebagai Daerah Swapraja diawali dengan adanya campur tangan Belanda berkaitan dengan urusan dalam Negeri Mataram pada pertengahan abad XVIII. Politik adu domba Belanda (*divide et impera*) telah menyebabkan konflik di Kerajaan Mataram hingga pada tahun 1755 dilakukan Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.

Dua tahun setelah itu, Belanda mengeluarkan lagi perjanjian Salatiga tahun 1757 yang berisi pemecahan Kerajaan Surakarta menjadi dua bagian yaitu Kasunanan di bawah Sunan Pakubuwana III dan Mangkunegaran di bawah Raden Mas Said yang kemudian menggunakan gelar Mangkunegara I. Dengan pembagian tersebut, Mangkunegara I mendapat hak atas tanah sebesar 4000 karya karena dianggap berjasa pada Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, tanah tersebut bertambah luas karena Mangkunegara dianggap banyak berjasa terhadap pemerintahan Belanda. Belanda selalu memberikan imbalan berupa tanah kepada pemerintahan Mangkunegara atas jasa-jasanya.⁷

Sejak pemerintahan Mangkunegara I (1757-1795) sampai dengan 1916, Mangkunegaran telah mengalami enam kali pergantian kekuasaan, yang berarti sudah ada tujuh orang Adipati yang pernah memerintah di Mangkunegaran. Dilihat dari perspektif politik modern, pergantian kekuasaan di wilayah Mangkunegaran sudah lebih moderat jika dibandingkan dengan daerah-daerah

⁷ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta : Penerbit Taman Siswa Yogyakarta, 1989, hlm. 5.

swaparaja yang lain. Dengan tetap memperhatikan adat yang berlaku, sistem pergantian takhta di Mangkunegaran sedikit banyak telah mencerminkan bentuk kedaulatan rakyat dalam batas tertentu, meskipun secara tidak langsung. Pergantian takhta di Mangkunegaran tidak lagi didasarkan atas urutan keturunan semata-mata, yang berarti hanya putra tertua raja dari permaisuri saja yang berhak menggantikan raja sebagai kepala pemerintahan, tetapi mulai mempertimbangkan pula kecakapan serta kemampuan seseorang sebagai calon pengganti raja. Ini berarti, di Magkunegaran anak menantu atau keponakan raja dimungkinkan untuk menduduki takhta Magkunegaran apabila dipandang memiliki kemampuan untuk memimpin rakyat.⁸

Salah satu contoh yang jelas dalam pergantian kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan dan kecakapan dalam memimpin di wilayah Mangunegaran adalah Mangkunegara VII. Magkunegara VII takhta dari Mangkunegara VI, yang merupakan ayah angkatnya. Pergantian takhta ini terjadi setelah Mangkunegara VI berhasil memulihkan kembali kondisi keuangan Kadipaten Mangkunegaran yang pada masa pemerintahan sebelumnya pernah mengalami krisis dan kemudian menjadikannya salah satu kadipaten yang cukup kaya. Beberapa tahun setelah keberhasilannya, Mangkunegara VI bermaksud untuk turun takhta. Mangkunegara VI menyatakan keinginannya kepada Residen Belanda di Surakarta karena pergantian takhta di daerah swaparaja saat itu harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Sebagai pengganti Mangkunegara VI, Residen Belanda menunjuk Raden Mas Soerjo Soeparto, putra dari selir Mangkunegara V.

⁸ Darsiti Soeratman, *op.cit.* hlm 18.

Sebelum menjadi Raja di Kadipaten Mangkunegaran, dia adalah putra ketiga dari Mangkunegara V (1881-1896), yang lahir pada 12 Desember 1885, dengan nama Raden Mas Ario Soerjo Soeparto. Meskipun lahir dari kalangan bangsawan, masa kecilnya banyak mengalami kesulitan dan kemalangan. Pada usia 11 tahun, ayahnya wafat dan ia dititipkan kepada pamannya yang eksentrik, Mangkunegara VI. Ia sering berkonflik dengan Mangkunegara VI karena keinginannya mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Ia lulus dari sekolah dasar gaya Barat selama tujuh tahun ketika berusia 16 tahun. Tidak lama sesudahnya ia meninggalkan *Vorstenlanden* tanpa izin dari pamannya Mangkunegara VI dan selama pelariannya kira-kira empat tahun ia bekerja sebagai pegawai *gubernamen* rendahan di Demak. Selama di Demak, ia terus belajar sendiri dengan memusatkan studinya pada bahasa Belanda dan kesusastraan Jawa. Kehadirannya di Demak berakhir pada tahun 1906 karena suatu insiden yang meyebabkannya berkonflik dengan Bupati dan mendapat kecaman dari Pemerintah di Batavia.⁹

Perubahan besar dalam kehidupan Raden Mas Soerjo Soeparto terjadi lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1911. Saat itu, Residen Van der Wijk, sudah mengatasi kesulitan dengan para pembesar Batavia berkaitan dengan peristiwa Demak. Setelah itu, ia mengangkat Raden Soerjo Soeparto sebagai penerjemah pribumi di Surakarta. Selama bekerja sebagai penerjemah pribumi, untuk pertama kalinya, Raden Soerjo Soeparto tampil di hadapan masyarakat umum sebagai tokoh terkemuka dalam Organisasi Boedi Oetomo Cabang Solo. Salah satu

⁹ George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 90.

cabang Boedi Oetomo yang mendapat predikat kepengurusan terbaik di Pulau Jawa. Beliau juga tampil sebagai salah seorang penyumbang karangan yang paling dihargai dalam surat kabar *Darmo Kondo*.

Pada tahun 1913 Raden Soerjo Soeparto mengajukan permohonan cuti dan berangkat ke Belanda untuk belajar untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan memperluas wawasan pengetahuannya. Tahun pertama di Belanda, ia belajar pada Universitas Leiden di Fakultas Kesusastraan Timur. Pada saat di Belanda, ia bertemu dan berteman baik dengan putra Pangeran Notodirojo, R.M. Noto Soeroto, yang saat itu sedang belajar Hukum di Leiden.

Bulan Mei 1914 pada akhir tahun pelajaran, ia memutuskan untuk bergabung dengan resimen *genedir* cadangan. Tidak lama berselang, pangkatnya dinaikkan menjadi kopral cadangan. Kariernya terus berkembang dan ia banyak disukai teman-teman sejawatnya sehingga ketika sudah tidak lagi menjadi kopral, ia tetap dikenal dalam resimennya sebagai "Kopral Kecil". Setelah Perang Dunia I, pada bulan Agustus 1914 unitnya dipindahkan dan hanya tinggal Raden Mas Soerjo Soeparto bersama Noto Soeroto yang menjadi orang Jawa yang masih berdinis dalam tentara Belanda. Ia dikirim ke sekolah opsir cadangan di Amersfoort dan dinaikkan pangkatnya sebagai letnan-dua cadangan pada bulan Mei 1915.

Akhir bulan Mei 1915, Soerjo Soeparto diberi izin cuti dan berkenan diterima oleh Ratu Belanda. Ia diberi izin untuk kembali pulang ke Jawa. Sesampainya di Surakarta pada bulan Juni 1915, Raden Mas Sueryo Soeparto tak lagi bekerja sebagai penerjemah pribumi, tetapi diberi kedudukan yang lebih

sebagai penanggung jawab urusan agraria di wilayah Residen Sollewijn Gelpke (1914-1918). Selama menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab urusan agraria inilah ia mendapat penilaian berkaitan dengan kemampuannya untuk kemudian diputuskan apakah ia bisa direkomendasikan untuk menggantikan Mangkunegaran VI yang akan segera turun takhta. Selain bertanggung jawab dalam urusan agraria, ia juga meneruskan apa yang ditinggalkannya dulu dan giat kembali dalam kehidupan sosial serta tampil sebagai politikus kelas utama.¹⁰

Pada bulan Februari 1916, sebulan sesudah Mangkunegara VI turun takhta dan pindah ke Surabaya, Gubernur Jendral Indenburg menunjuk dan mengangkat Soerjo Soeparto sebagai kepala keluarga Magkunegaran yang baru. Pengangkatan ini dilakukan dengan syarat, Soerjo Soeparto mengundurkan diri dari Boedi Oetomo dan berhenti dari jabatannya pada tentara cadangan Belanda. Pada tanggal 15 Februari ia menandatangani perjanjian yang memberi kekuasaan yang luas kepada residen.

Tanggal 3 Maret 1916 Soerjo Soeparto resmi menjadi Kepala Kerajaan Mangkunegaran dengan gelar Pangeran Adipati Ario Prabu Parang Wedono (Komandan Militer), yaitu, gelar yang digunakan oleh pemegang takhta Mangkunegaran yang pada saat dinobatkan sebelum mencapai usia 40 tahun. Setelah resmi menjadi Mangkunegara VII pada Tahun 1924, ia juga diberi pangkat Letnan Kolonel dalam dinas Gubermen Hindia Belanda dan diangkat sebagai Komandan Legiun.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 98.

Pada masa Pemerintahan Mangkunegara VII, Istana Mangkunegaran banyak mengalami kemajuan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kemajuan yang diperoleh Pemerintahan Mangkunegaran tersebut tidak lepas dari peran dan kinerja yang dilakukan Mangkunegara VII sebagai pemegang takhta di Kadipaten Mangkunegaran.

Kedudukan Soerjo Soeparto sebagai kepala Pemerintahan Mangkunegaran menjadikannya sebagai orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di istana Mangkunegaran. Kekuasaan yang dimilikinya memberikaan kemungkinan bagi Mangkunegara VII untuk berbuat lebih banyak dalam menagatur rumah tangga Praja Mangkunegaran. Sebagai bagaian dari wilayah pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintahan Mangkunegaran menjalankan kebijakan-kebijakan politik yang sejalan dengan garis politik Pemerintah Pusat di Batavia.

Pada tahun 1900-1942, Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi yang bertumpu pada edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan penduduk), sehingga Pemerintah Mangkunegaran pun terpengaruh dengan kebijakan politik etis ini. Selain harus tunduk pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga memiliki otonomi yang luas untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kebijakan-kebijakan politik etis dari pusat kemudian diterjemahkan sendiri oleh Pemerintah Praja Mangkunegaran.¹²

¹² Wasino, *Politik Etis dan Modernisasi Pendidikan di Mangkunegaran, 1900-1945*, Laporan Penelitian pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang, 1996, hlm. 4.

Berbeda dengan kebijakan-kebijakan di Kasunanan Surakarta, kebijakan yang dijalankan di Mangkunegaran memiliki perbedaan yang sangat kontras, baik dalam orientasi ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Bahkan kebijakan politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial cenderung berpihak pada penguasa Mangkunegaran daripada Kasunanan Surakarta. Lembaga-lembaga kolonial, baik benteng, kantor pemerintahan, rumah pejabat, aktifitas perekonomian maupun dalam pengadaan lembaga pendidikan, lebih terpusat di Mangkunegaran (Kampoeng Lor). Sedangkan untuk Kampoeng Kidul (Kasunanan Surakarta) lebih menekankan Islam sebagai basis politiknya. Pelaksanaan politik Islam di Kasunanan Surakarta bertujuan untuk membangun legitimasi keraton yang telah lama memudar. Di sisi yang lain, politik Islam juga merupakan simbol perlawanan terhadap politik Pemerintah Hindia Belanda.¹³

Bentuk politik Islam yang dijalankan oleh Pemerintahan Kasunanan Surakarta tampak jelas dalam hal pembukaan berbagai lembaga pendidikan bernuansa Islam. Alasan yang dikemukakan Sunan untuk membuka pendidikan bernuansa Islam adalah: (1) Pendirian lembaga pendidikan Islam dapat membuka celah-celah penyelesaian perbedaan sosial dan kesenjangan antar-kelompok sosial; (2) Berdirinya lembaga pendidikan Islam akan membentuk solidaritas dan menggerakkan potensi Kampoeng Kidoel; (3) Pendidikan keterampilan memacu

¹³ Benny Juwono, *Etnis Cina di Surakarta 1890-1927*, Jurusan Ilmu Sejarah: Universitas Negeri Gadjah Mada, 1998, hlm. 18.

penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang sebelumnya tidak mungkin memasuki pendidikan formal.¹⁴

Saat Belanda melaksanakan politik etis, raja yang memerintah di Mangkunegaran adalah Mangkunegara VI (1896-1916) dan Mangkunegara VII (1916-1942). Dua penguasa ini pernah mengenyam pendidikan formal Eropa, bahkan Mangkunegara VII pernah belajar ke Negeri Belanda pada masa mudanya. Itulah sebabnya para penguasa ini, terutama mangkunegara VII sangat progresif dalam memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya agar tidak ketinggalan zaman. Hal itu antara lain dijalankan dengan memberi prioritas utama kepada pembangunan-pembangunan infrastruktur dan pembangunan dunia pendidikan.

Pada masa pemerintahannya, Mangkunegara VII banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah secara teratur, sistematis dan mempunyai jenjang serta waktu yang telah ditentukan, sedangkan pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang diselenggarakan secara tertib, terarah dan terencana yang berlangsung di luar sekolah.¹⁵ Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, Magkunegaran sudah mengusahakan pendirian sekolah sejak masa Pemerintahan Mangkunegara VI.

Sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah Siswo Mangkunegara dan sekolah Siswo Rini. Sekolah Siswo Magkunegara adalah sekolah pertama milik

¹⁴ Benny Juwono. *op.cit.* hlm. 65.

¹⁵ Zahara Idris, *Dinamika Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1981, hlm. 12.

Mangkunegaran, yang didirikan pada tahun 1912. Sekolah Siswa Mangkunegaran berlokasi di depan Istana Mangkunegaran menghadap ke arah timur. Sekolah ini merupakan sekolah angka satu, tetapi dua tahun kemudian 1914, sekolah ini di jadikan HIS angka IV di Surakarta.¹⁶

Pelaksanaan proses kegiatan belajar-mengajar pada sekolah Siswo Mangkunegaran dilakukan pada pagi hingga siang hari, yang dimulai pada jam 07.30 sampai jam 13.00 WIB, dengan materi yang diajarkan adalah bahasa Jawa, Ilmu Bumi, Berhitung dan Bahasa Melayu. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Belanda. Penyediaan tenaga pendidik diambil dari mereka yang memiliki ijazah *Hoogere Kweekschool*, yaitu lulusan sekolah pendidikan guru yang satu tingkat lebih tinggi dari *Kweekschool*.

Pada sekolah Siswo Magkunegaran, perekrutan siswa dilakukan hanya pada anak-anak dari pegawai pamong praja Mangkunegaran, anak-anak legiun Mangkunegaran dan anak-anak *priyayi*. Sedangkan untuk anak-anak dari kalangan rakyat jelata baru boleh masuk apabila ada sisa bangku yang kosong.

Untuk sarana dan prasarana penunjang sekolah seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Praja Mangkunegaran. Sekolah menyediakan buku-buku pelajaran yang sama dengan yang digunakan oleh HIS pemerintah Belanda. Meskipun sarana dan prasarana sekolah ditanggung oleh pemerintah Mangkunegaran, kepada para murid tetap dipungut bayaran sekolah. Besarnya uang sekolah tidaklah sama antara murid yang satu dengan murid yang lain.

¹⁶ Amin Singgih, *Usaha dan Jasa Sri Mangkunegara VII Terhadap Pendidikan dan Pengajaran*, Surakarta : Rekso Pustoko Mangkunegara, 1944, hlm. 2.

Selain sekolah Siswo Mangkunegaran, di Mangkunegaran juga didirikan sekolah Siswo Rini, yaitu, sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Mangkunegaran untuk kaum perempuan. Sekolah ini berlokasi di depan pintu gerbang timur istana Mangkunegaran. Pendirian sekolah ini didasarkan atas pertimbangan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga. Kaum perempuan diharapkan mampu menjadi mitra kerja laki-laki dalam keluarga, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta mendidik anak-anak sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, terlebih lagi kepada Tuhan.

Dalam pelaksanaannya sekolah ini ditangani langsung oleh Pemerintah Praja Mangkunegaran yang bertugas mengadakan pemeriksaan terhadap perkembangan sekolah setiap tahun. Dalam penyampaian materi pelajaran, Sekolah Siswo Rini hanya masuk lima kali dalam satu minggu dan proses belajar mengajarnya dilaksanakan mulai jam 07.30, sampai 12.30. Sekolah ini terdiri dari 7 kelas dan yang berhak menentukan kelas-kelas ini adalah kepala sekolah. Pengangkatan Kepala Sekolah Siswo Rini ditentukan oleh Kepala Mangkunegaran dengan persetujuan Residen Surakarta waktu itu.¹⁷

Seperti halnya Sekolah Siswo Mangkunegaran, penerimaan siswa di Sekolah Siswo Rini juga yang diutamakan untuk anak-anak dari kalangan pegawai dan *abdi dalem* istana Mangkunegaran. Anak-anak dari kalangan rakyat biasa boleh masuk apabila sekolah ini mengalami kekurangan siswa utama. Pada

¹⁷ *Ibid*, hlm. 57.

masa pemerintahan Mangkunegara VII, kedua sekolah yang didirikan pada masa Mangkunegara VI tersebut tetap dipelihara dan dikembangkan.

Perekrutan tenaga pengajar kedua sekolah ini, Mangkunegara VII lebih mengutamakan pada tenaga-tenaga pengajar dari kalangan Praja Mangkunegaran sendiri. Sedangkan untuk sistem pengajarannya tidak jauh berbeda dengan sistem pengajaran yang dijalankan pada pemerintahan Mangkunegara VI. Hal ini dilakukan karena sistem pengajaran pada sekolah-sekolah tersebut tetap mengacu pada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Adapun usaha-usaha Mangkunegara VII dalam peningkatan pendidikan formal selain meningkatkan dan mengembangkan sekolah-sekolah yang sudah dirintis di Mangkunegaran oleh pemerintahan sebelumnya, beliau juga mengusahakan didirikannya sekolah-sekolah desa dan sekolah MULO untuk pribumi yang disebut *MULO School Mangkunegaran*.

Mangkunegara VII mulai mendirikan sekolah-sekolah desa pada tahun 1918 dengan jumlah delapan belas sekolah, sedangkan untuk biaya pengadaan delapan belas sekolah tersebut ditanggung oleh Pemerintah Mangkunegaran.¹⁸ Biaya yang ditanggung Pemerintah Mangkunegaran meliputi pembangunan gedung sekolah, pengadaan buku-buku dan alat tulis, perlengkapan kelas, gaji guru dan kepala sekolah. Untuk pengadaan dan penambahan jumlah sekolah desa selanjutnya, Pemerintah Mangkunegaran meminta bantuan dari desa-desa untuk menyediakan gedung-gedung sekolah, sedangkan untuk biaya yang lain tetap ditanggung oleh Pemerintah Magkunegaran.

¹⁸ Rn. Tg. Joyowidagdo, *Godenkhook Mangkunegaran 1939*, Rekso Pustoko : Mangkunegaran, 1939, hlm. 176-180.

Kebijakan ini ditempuh semata-mata karena keinginan Mangkunegara VII untuk secepat mungkin menambah jumlah sekolah desa sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Mangkunegaran. Selain dalam bidang pengadaan sekolah-sekolah bagi para Praja Mangkunegaran, Mangkunegara VII juga melakukan usaha pemberian beasiswa bagi Praja Mangkunegaran yang sedang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang diadakan oleh Pemerintahan Mangkunegaran. Usaha pemberian beasiswa Mangkunegaran adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada anak-anak pegawai Pemerintah Mangkunegara yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun orangtuanya tidak mampu.

Mengenai pemberian beasiswa ini diatur dalam *Rijksblad* tahun 1917, Nomor 20, yang isinya sebagai berikut:

*Kang kena kapirangan pitulungan dhuwit kanggo waragad sinau iku:
 ha. Putra sentana ing Mangkunegaran kang manggon ing bawah Mangkunegaran.
 na. putra sentana ing mangkunegaran kang kaparingan balanja saka paparentah Mangkunegaran kang ora manggon ing bawah Mangkunegaran, naging isih ana ing sajeroning Karesidenan Surakarta.
 ca. priyayi lan opsir ing Mangkunegaran, kang isih tetep utawa kang wus kaparingan lereh kalayan .*

Kutipan di atas, dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Yang mendapatkan beasiswa Magkunegaran adalah:

- 1) Anak pegawai yang tinggal di wilayah Magkunegaran.
- 2) Anak pegawai praja yang tidak tinggal di wilayah Mangkunegaran, tetapi masih dalam wilayah Karesidenan Surakarta.
- 3) *Priayi* dan opsir Magkunegaran yang masih aktif maupun yang sudah Pensiun.

Pada dasarnya, badan untuk urusan beasiswa ini sudah didirikan pada masa pemerintahan Mangkunegara VI atas kerja sama kepala Pemerintah

Mangkunegaran, yaitu, Mangkunegara VI dengan Residen Surakarta, yang pada saat itu dijabat oleh G.F. Van Wijk tahun 1912. Pada tahun 1913, dibuat peraturan mengenai pemberian beasiswa, tepatnya pada tanggal 15 oktober 1913, No. 11/Q, dan dimasukkan ke dalam *Rijksblad* Nomor 20 Tahun 1917. Dalam pemberian keputusan beasiswa atau *studifond*, Mangkunegara VII dibantu oleh suatu badan penasehat yang terdiri dari bupati patih sebagai ketua, *supperintendent*, dan mayor *legiun*. Tenbusan surat keputusan pemberian beasiswa diasampaikan kepada orangtua murid yang bersangkutan.

Pada awalnya besarnya beasiswa disesuaikan dengan penghasilan orang tua perbulan namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kesulitan sehingga pada tahun 1919 terjadi perubahan pada pemberian beasiswa. Dalam pemberiaan beasiswa didasarkan pada jenis dan bidang pendidikan tanpa memperhitungkan penghasilan orang tua. Selanjutnya bagi anak-anak yang menerima bantuan beasiswa dari Pemerintah Magkunegaran setelah mereka menyelesaikan pendidikannya dan mulai bekerja mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut dalam pengembalian uang datur dalam *Rijkblad* Nomor 20 Tahun 1917, pada Bab V yaitu:

Sawiji-wijine bocah sawuse mari nampani pitulungan waragad saka parentah, bakal kapingan layang paratelan pariciane pitulungan waragad mau tanpa kapetung anakane, sarta kudu tumuli nagturake bali dhuwit pitulungan saka parentah mau... (Rijkblad, 1917, hlm.143).

Terjemahan bebas dari ungkapan di atas adalah sebagai berikut:

Bagi setiap anak yang telah memperoleh bantuan beasiswa dari pemerintah, akan mendapatkan surat yang berisi rician mengenai beasiswa yang sudah diberikan tanpa dihitung bunganya, dan kepada mereka diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut.

Meskipun bantuan tersebut diistilahkan dengan beasiswa, tetapi dalam kenyataannya merupakan pinjaman dari pemerintah. Namun, tidak semua penerima beasiswa mengembalikan uang tersebut. Adapun cara pengembaliannya adalah dengan cicilan tiap bulan sebesar 20% dari penghasilan perbulan, apabila penghasilan lebih dari f 50,- per bulan. Tetapi ada kemungkinan cicilan lebih kecil lagi. Hal ini terjadi apabila penerima beasiswa mengajukan keberatan. Bagi yang kemudian bekerja pada Pemerintah Magkunegaran, paling sedikit harus mengembalikan 5% dari penghasilannya. Dari tahun 1912 – 1923 Mangkunegara telah mengeluarkan beasiswa atau *studie fonds* sebesar f 162.078,71 (Djawa, 1924).¹⁹

Selain dalam bidang peyediaan sekolah-sekolah dan pemberian beasiswa atau *studie fonds*, Mangkunegara VII juga memberikan beasiswa bagi pendidikan non-formal. Dalam peyediaan pendidikan non-formal, Mangkunegara VII lebih banyak bergerak dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Pada masa Pemerintahan Mangkunegara VII banyak sekali didirikan organisasi-organisasi pemuda, di antaranya adalah *Javaansche Padvinders Organisatie* (JPO) yang didirikan pada tahun 1917, Kirado Mudo yang didirikan pada tahun 1934 dan Mulat Sarira.

Didirikannya organisasi-organisasi ini pada dasarnya bertujuan untuk menampung para pemuda yang berada di wilayah Mangkunegaran agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemuda. Hal ini dipandang perlu karena dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut akan dapat mendatangkan keuntungan bagi

¹⁹ Moh. Daljono, *Ketetapan Mangkunegaran*, Surakarta : Rekso Pustoko, 1939, hlm. 42.

para pemuda itu sendiri. Selain melalui pendirian organisasi-organisasi ini, dalam pendidikan non-formal, Pemerintah Mangkunegaran juga mengusahakan pemberantasan buta huruf untuk seluruh rakyat Mangkunegaran. Usaha pemberantasan buta huruf ini dilakukan Mangkunegara VII atas pertimbangan masih banyaknya *kawula* Mangkunegaran yang tidak bisa membaca dan menulis.

Pemberantasan buta huruf dikerjakan menurut rencana yang telah ditentukan dalam sistem pendidikan menurut Mangkunegaran. Pada waktu itu, diadakan panitia istimewa yang menyusun bagian keuangan dan guru bantu yang diberi tugas untuk memimpin pemberantasan buta huruf. Pemberantasan buta huruf umumnya diikuti oleh rakyat biasa, sedangkan bagian yang mengurus dan menguasai tata laksana pemberantasan buta huruf tersebut diserahkan kepada kalangan *Pangreh Praja*.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh *Pangreh Pradja* dan panitia yang dibantu oleh kaum guru Mangkunegaran sehingga jumlah murid yang mengikuti program pemberantasan buta huruf ini bertambah dengan pesat. Pada tahun 1942 terdapat sekitar 510 lembaga pemberantasan buta huruf untuk seluruh wilayah Mangkunegaran, dengan jumlah siswa sebanyak 9.064 orang sehingga kursus untuk pemberantasan buta huruf ini makin menunjukkan eksistensi dan manfaatnya bagi masyarakat Mangkunegaran.²⁰

²⁰ Amien Singgih, *op.cit.*, hlm. 2.

C. Pendidikan Perempuan Pada Masa Mangkunegara VII

Pengembangan pendidikan di wilayah Praja Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara VI dan Mangkunegara VII ditunjukkan dengan banyaknya sekolah-sekolah guna kepentingan dan kemajuan rakyat di wilayah Mangkunegaran. Penyelenggaraan pendidikan di kawasan Mangkunegaran tersebut tidak hanya menyediakan sekolah-sekolah bagi golongan laki-laki, tetapi juga pendidikan bagi golongan perempuan. Segera setelah beliau naik takhta, nasib perempuan-perempuan yang ada di Magkunegaran segera mendapat sedikit titik terang, yaitu, dengan diadakannya aturan tentang batas umur minimal bagi perempuan untuk diperkenankan memasuki masa perkawinan (semacam undang undang perkawinan).

Artinya, sudah ada perlindungan secara hukum terhadap perempuan di Magkunegaran dan sekaligus menghindari perkawinaan anak-anak yang terjadi sebagai salah satu kebiasaan orang Jawa pada saat itu. Undang-undang yang dibuat oleh Mangkunegara berisi tentang batas rendah bagi usia anak perempuan untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu 15 tahun. Hal ini dilakukan oleh Mangkunegara VII dengan tujuan melindungi generasi muda dari perkawinan sebelum badan dan pikiran cukup matang untuk menerima kewajiban selaku ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak yang harus mereka asuh dengan baik.²¹

Taradisi Jawa menetapkan bahwa setelah menikah, seorang perempuan harus memutuskan semua ikatan pribadi dengan kehidupan sebelumnya, karena

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

ikatan emosional pada masa kanak-kanak dapat membebani pengabdian cinta kepada suami mereka. Perempuan yang sudah menikah dipaksa mengakhiri semua hubungan formal dengan masa lalu. Hal ini meyaratkan bahwa para perempuan Jawa dipaksa harus melupakan riwayat pribadi yang meliputi pendidikan Barat yang dianggap mahal dan canggih.²²

Selain di keluarkannya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan bagi perempuan di Mangkunegaran, usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Mangkunegara VII dalam mempertinggi kedudukan perempuan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi kaum perempuan, Mangkunegara VII tidak hanya melanjutkan dan mengembangkan sekolah-sekolah perempuan yang telah ada pada masa sebelumnya, tetapi juga membangun gedung-gedung sekolah baru guna menunjang dan meningkatkan pendidikan yang telah ada pada masa pemerintahan Mangkunegara VI.

Selain sekolah-sekolah yang didirikan oleh Praja Mangkunegaran sendiri, di Mangkunegaran juga didirikan sekolah-sekolah swasta. Dalam pendirian sekolah-sekolah swasta ini, Mangkunegara VII banyak membantu dan mendukung pendirian dan pengembangan sekolah-sekolah swasta tersebut. Berbeda dengan pembaruan-pembaruan dalam bidang lainnya, seperti birokrasi dan pengatuaran keuangan, pembaruan dalam bidang pendidikan secara politis tidak banyak mengalami pencekalan dari pemerintah Hindia Belanda. Walaupun pada dasarnya segala kebijakan pemerintah Mangkunegaran dan pelaksanaannya di lapangan

²² Frances Gouda, *op. cit.* hlm. 165.

tidak bebas dari pengawasan Pemerintah Kolonial Belanda, yang mengkhawatirkan kelangsungan kekuasaannya di Hindia Belanda.²³

Salah satu bentuk perhatian Mangkunegara VII dalam bidang pendidikan swasta adalah dengan didirikannya sekolah gadis *Solosche Van Deventer Vereeniging* di lingkungan Mangkunegaran, Surakarta. Sekolah tersebut merupakan sekolah menengah putri milik swasta di bawah naungan yayasan Van Deventer Fonds yang berpusat di Belanda. Sekolah ini dapat berdiri karena mendapat bantuan keuangan dari Praja Mangkunegaran, demikian pula dalam penyelenggaraan pendidikan setiap tahunnya juga masih mendapat bantuan dari Praja Mangkunegaran. Gagasan awal didirikannya sekolah ini di mulai pada masa Pangeran Adipati Harya Mangkunegara ke VII pada tahun 1925.²⁴

Guna merealisasikan gagasan tersebut maka dicarilah tanah atau bangunan yang mampu menjadi sekolah dan asrama dalam menyampaikan pendidikan, yang kemudian dipilihlah *dalem* (rumah) dari Pangeran Natadiningrat yang dibangun sejak awal 1917. Setelah muncul suatu kesepakatan dan disetujui oleh Mangkunegara VII maka kompleks *dalem* Pangeran Natadiningrat dibeli oleh Yayasan Van Deventer seharga FL 20.000 (sekitar dua puluh ribu gulden). Akhirnya sekolah Van Deventer di Mangkunegaran diresmikan tepat pada tanggal 1 Juli 1927. Setelah diresmikanya sekolah tersebut, kompleks *dalem* pangeran Notoningratan dibalik namakan atas nama Yayasan Van Deventer pada tanggal 12 Maret 1927. Sekolah Van Deventer sendiri merupakan sekolah menengah untuk

²³ Wasino, *op.cit.*, hlm. 23.

²⁴ Alex Sudewa, *Dari Kartasura ke Surakarta Jilid I, Yogyakarta : Lembaga Studi Asia*, 1995, hlm. 21.

ketarampilan perempuan sebelum mereka masuk kejenjang pernikahan dan kehidupan keluarga.

Pada proses pendirian sekolah ini didasarkan atas perhatian Mangkunegara VII dalam peningkatan nasib gadis-gadis di kalangan Mangkunegaran, serta perlunya pendidikan bagi gadis-gadis supaya mereka lebih pandai dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam sebuah keluarga.

Selain alasan-alasan di atas, sebab lain didirikannya sekolah ini oleh Mangkunegara VII adalah untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa dari Van Deventer, tokoh politik etis Belanda yang telah meninggal. Van Deventer adalah teman baik Mangkunegara VII pada saat beliau sedang bersekolah di negeri Belanda tahun 1913-1915. Van Deventer juga datang pada saat penobatan Raden Mas Ario Soerjo Soeparto menjadi Raja Keraton Mangkunegaran di Solo. Dalam *Triwindoe-Gedenkboek* (Buku Kenangan Triwindu) Van Deventer menyatakan kekagumannya atas pesona tanah Jawa. Ia juga mengungkapkan rasa senangnya karena bisa bersahabat dengan Raden Mas Ario Soerjo Soeparto atau Mangkunegara VII.²⁵

Salah satu bukti pengukuhan persahabatan mereka adalah dengan didirikannya Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran yang kemudian mendapat dukungan dari Gusti Kanjeng Ratu Timoer, istri dari Mangkunegara VII. Para murid sekolah Van Deventer berasal dari daerah-daerah yang jauh dari luar Mangkunegaran, mereka rata-rata berasal dari daerah Jawa Barat dan Jawa timur,

²⁵ R.T. Amin Singgih, *Usaha dan Jasa Sri Mangkunegara VII Terhadap Pendidikan dan Pengajaran*, Surakarta: Rekso Pustoko Mangkunegara, 1944, hlm. 2.

bahkan ada juga murid yang berasal dari wilayah luar pulau Jawa (Bali). Seperti halnya sekolah-sekolah lain yang ada di daerah Mangkunegaran, dalam penerimaan murid sekolah Van Deventer lebih mengutamakan putri-putri dari kalangan pejabat tinggi di kalangan kraton maupun di luar kraton sedangkan untuk murid dari golongan rakyat jelata mereka boleh masuk apabila terdapat sisa tempat di ruangan kelas. Selain dari kalangan pejabat dan kalangan sentono dalam sekolah Van Deventer juga menampung murid dari lulusan sekolah dasar, sekolah *Kartini School*, *Europese Lagere School* (ELS) atau *Hollandse Inlandse School* (HIS).²⁶

Materi Pelajaran yang diberikan di Van Deventer School pada dasarnya sama dengan materi yang diberikan di sekolah Siswa Rini yaitu pelajaran mengurus rumah tangga, seperti memasak, mengurus keuangan rumah tangga, kesehatan, menjahit, selain itu juga terdapat materi pelajaran umum seperti berhitung, membaca dan menulis, hanya saja terdapat tambahan pelajaran seperti menyanyi, menari dan karawitan. Kurikulum yang lengkap dan materi pelajaran yang berbeda dengan dengan sekolah bagi perempuan-perempuan di Mangkunegaran menjadikan sekolah Van Deventer ini sebagai pusat pendidikan perempuan yang paling diminati bagi gadis-gadis di Jawa pada saat itu.

Usaha yang dilakukan Mangkunegara VII didasarkan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga. Perempuan diharapkan menjadi teman sekerja laki-laki dalam keluarga, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus serta mendidik anak-anak

²⁶ *Ibid.* hlm. 67.

hingga tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab pada diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, terlebih kepada Tuhan. Lebih dari itu, perempuan dalam rumah tangga dituntut untuk menjadi terang yang dapat menampakkan cahayanya bagi seluruh keluarga.

Pada tahun 1927 jumlah murid yang masuk sekolah Van Deventer ini adalah 24 siswi, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 1936 menjadi 79 siswi dan tahun 1938 menjadi 100 siswi dengan rincian kelas 1e. 39 siswa, 2e. 28 siswa, 3e 16 siswa dan 4e 17 siswa.²⁷ Dalam penyampaian materi pelajaran, sekolah Van Deventer hanya masuk lima kali dalam satu minggu dan proses belajar mengajarnya dilaksanakan mulai jam 07.30, sampai 12.30 dengan dua kali istirahat selama 15 menit.²⁸

Materi Pelajaran yang diberikan di Van Deventer School pada dasarnya sama dengan materi yang diberikan di sekolah Siswa Rini yaitu pelajaran khusus kerumah tanggaan, seperti memasak, mengurus keuangan rumah tangga, kesehatan, menjahit, selain itu juga terdapat materi pelajaran umum seperti berhitung, membaca dan memulis, hanya saja terdapat tambahan pelajaran seperti menyanyi, menari dan krawitan. Kurikulum yang lengkap dan materi pelajaran yang berbeda dengan dengan sekolah bagi perempuan-perempuan di mangkunegaran menjadikan sekolah Van Deventer ini sebagai pusat pendidikan perempuan yang paling diminati bagi gadis-gadis di Jawa pada saat itu .

²⁷ *Verslag*, 1937-1938, hlm. 5.

²⁸ Honggopati Tjiptrohupojo, *Serat Najaka Tama*, Surakarta,;Rekso Pustoko, 1930, hlm. 87-90.

Sekolah Van Deventer memang memiliki kualitas yang lebih jika dibandingkan dengan sekolah siswo Rini milik Mangkunegaran yang dibangun pada masa pemerintahan Mangkunegaran VI. Selain kurikulumnya yang lengkap, sekolah ini juga mendapat perhatian khusus dari Mangkunegara VII.

Selain didanai dari Yayasan Van Deventer yang berada di Belanda, sekolah ini juga mendapat bantuan dari Praja Mangkunegaran. Bantuan tersebut diwujudkan dengan diberikannya dana bantuan dalam penyelenggaraan sekolah sebesar f 300 dan f 384 perbulan guna menunjang pelaksanaan pembelajaran di sekolah Van Deventer yang berada di lingkungan Kraton Mangkunegaran ini.²⁹

Bentuk perhatian Mangkunegara VII dalam pendirian sekolah ini adalah dengan diberikan nya fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan kepada sekolah Van Deventer, fasilitas-fasilitas tersebut tidak diberikan kepada sekolah-sekolah perempuan lain yang ada di kawasan Mangkunegaran, termasuk Siswa Rini sekolah perempuan yang didirikan pada masa Mangkunegara VI yang kemudian dikembangkan pada Masa Mangkunegara VII.

Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi, diperkenankannya murid-murid sekolah Van Deventer untuk menggunakan pendopo Agung Mangkunegaran beserta gamelannya selama satu kali seminggu, hal tersebut dilakukan guna menunjang matapelajaran menari, menyanyi dan krawitan Jawa, dimana sering sekali Gusti Kanjeng Ratu Timur permausuri dari Mangkunegara VII sendiri yang langsung memberikan contoh-contoh pelajaran kepada para murid yang berjumlah 79-100 orang. Dengan kasih sayang bak seorang ibu yang mengasuh anaknya, Gusti

²⁹ *Verslag*, 1938, hlm. 6.

Kanjeng Ratu Timur dengan sabar beliau mengajarkan gerakan gerakan tari Jawa yang lemah gemulai, bahkan dicontohkannya pula bagai mana cara berlaku *ndodok* (berjalan jongkok).³⁰

Selain perhatian dari Gusti Kanjeng Ratu Timur, pada saat-saat tertentu Mangkunegara VII meyeempatkan diri melihat latihan-latihan yang dilakukan murid-murid Van Deventer School di pendopo agung dan langsung memberikan kritik dan petunjuk serta memerintahkan seorang penari yang lebih ahli dan senior untuk memberikan contoh kepada murid-murid yang sedang belajar, selain itu beliau juga secara pribadi memberikan teori-teori dan teknik-tekniknya bagai mana menari yang benar, dengan harapan agar para siswi Van Deventer School benar-benar memahami dasar-dasar tari Jawa yang kemudian dapat mereka kembangkan sendiri.

Selain diperbolehkan menggunakan Pendopo Agung untuk menunjang materi yang diberikan di sekolah, empat kali dalam satu minggu para murid Van Deventer School juga diperkenankan menggunakan kolam renang, lapangan tenis dan lapangan olahraga lain di dalam Istana Mangkunegaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar didapat generasi perempuan yang sehat, kuat, terampil dan pandai. Pelajaran etika dan adat kebiasaan Jawa juga diberikan agar para siswa tidak asing dengan budayanya sendiri. Budaya Jawa juga diajarkan agar dapat membentuk watak ketimuran bagi perempuan yang telah menikmati pengetahuan Barat dan hal ini juga dilakukan di lingkungan istana dan keluarga Mangkunegaran.

³⁰ Frances Gouda, *op.cit.*, hlm. 213.

Apabila sekolah Van Deventer mengalami kesulitan tertentu, maka Mangkunegara VII beserta Gusti Kanjeng Ratu Timur selalu memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuannya sehingga sekolah Van Deventer nenanjak namanya menjadi sekolah favorit bagi kaum perempuan yang belum dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekolah Van Deventer juga dianggap sebagai sekolah yang menentukan karakter bagi perempuan Jawa untuk dipersiapkan dalam masyarakat nanti. Ini terbukti dalam tindakan Pangeran Adipati Harya Mangkunegara VII yang menunjuk putrinya yang kedua Raden Ajeng Partinah yang telah selesai menjalani Study di AMS Yogyakarta, untuk kembali mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah Van Deventer selama dua tahun, dengan tujuan agar dapat mengawinkan antara pengetahuan teori dengan pengetahuan praktik, ditambah dengan ilmu pendidikan dan Ilmu kerumahtanggaan.³¹

Selain dalam penyediaan gedung dan tempat yang mendukung dalam penyampaian materi di sekolah keputrian Van Deventer, Mangkunegara VII juga menyediakan beasiswa bagi perempuan-perempuan putri kerabat Mangkunegaran yang mampu melalui studi fonds Mangkunegara VII, selain untuk sekolah Van Deventer School pemberian studi fonds juga diberikan kepada gadis-gadis yang masuk sekolah MULO ataupun AMS Semarang dan sekolah guru kepandaian putri di Jakarta.

Pemberian beasiswa tersebut bertujuan agar gadis-gadis Mangkunegaran dapat menempuh pendidikan formal secara lebih baik. Usaha-usaha yang

³¹ *Ibid.*, hlm. 149.

dilakukan Mangkunegara VII tersebut didasarkan atas pertimbangan akan pentingnya kedudukan serta tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga. Perempuan diharapkan dapat menjadi mitra kerja laki-laki dalam keluarga, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta mendidik anak-anak hingga tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab pada diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, terlebih kepada Tuhan.

Perempuan dalam rumah tangga juga dituntut untuk menjadi terang yang dapat menampakkan cahayanya bagi seluruh keluarga. Segala kemampuan ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya bekal pendidikan yang cukup bagi kaum perempuan. Untuk tujuan inilah maka Pemerintahan Mangkunegaran, memperbolehkan dan membantu pendirian sekolah Van Deventer di lingkungan Mangkunegaran Surakarta. Di sekolah ini para perempuan dipersiapkan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan segala tanggung jawabnya, dengan diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup mengenai kerumahtanggaan dan berbagai macam ketrampilan sebagai bekal setelah mereka menikah kelak dan berperan dalam kehidupan masyarakat.